



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 188.44/K.134/2022

TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa guna meningkatkan kelancaran dan efektifitas penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah dalam rangka pelaporan pertanggungjawaban kinerja dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan organisasi, maka perlu dibentuk Tim yang melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan

Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 38);
 4. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 62);
 5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja;
 6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/31/M.PAN/XII/2014 tentang penetapan Kinerja sesuai dengan tugas Pokok dan Fungsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022, dengan susunan keanggotaan yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

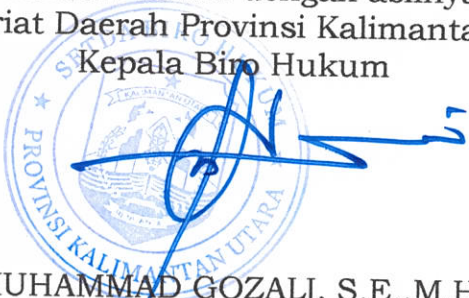
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengolah data Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah sesuai sasaran dan indikator Perangkat Daerah;
- b. Menyusun data laporan sesuai sasaran dan indikator perangkat daerah;
- c. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah;
- d. Mengumpulkan data LKjIP Perangkat Daerah dalam penyusunan LKjIP Provinsi;
- e. Mengkompilasi LKjIP Perangkat Daerah sebagai bahan LKjIP Provinsi

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab pada Gubernur Kalimantan Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.134/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN
2022

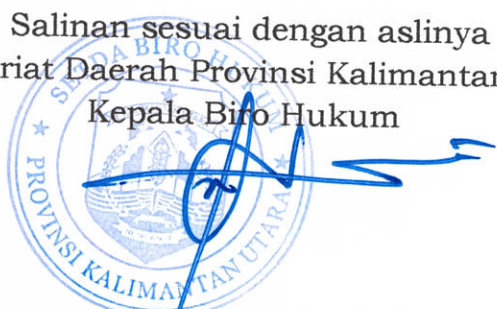
SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Nama	Jabatan Dalam Tim/Instansi
1.	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua I
5.	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua II
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua III
7.	Inspektur Provinsi Kalimantan Utara	Sekretaris
8.	Kepala Bappeda Dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Tim LAKIP Provinsi
9.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Tim LAKIP Provinsi
10.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Tim LAKIP Provinsi
11.	Kepala Biro Pemerintah Dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Tim LAKIP Provinsi
12.	Kepala Bagian Reformasi Birokrasi	Tim LAKIP Provinsi
13.	Kepala Bagian Tatalaksana	Tim LAKIP Provinsi
14.	Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Tim LAKIP Provinsi
15.	Kepala Subbagian Akuntabilitas Kinerja	Tim LAKIP Provinsi
16.	Kepala Subbagian Reformasi Birokrasi	Tim LAKIP Provinsi
17.	Bertius, S.Hut	Tim LAKIP Provinsi/Bappeda Dan Litbang
18.	Herman, S.Sos., M.HP	Tim LAKIP Provinsi/Inspektorat
19.	H. Saharin K, S.Pi., M.Si	Tim LAKIP Provinsi/Bappeda Dan Litbang
20.	Adelia Septasari, S.STP	Tim LAKIP Provinsi/ Biro Organisasi
21.	Nunung Nurhayati, S.Sos	
22.	Edi Gunawan, SE	
23.	Azruni, A.Md	
24.	Rusnaini, SE., MM	Tim Pengumpul Data/Sekretariat DPRD
25.	Novita Limbong, S.Sos	

26.	Kasiyono	Tim Pengumpul Data/Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
27.	Diah Rahmi Fitria, Se, M.AP	Tim Pengumpul Data/Dinas Lingkungan Hidup
28.	Muhammad Thalib, SE	
29.	Suparno, SE	Tim Pengumpul Data/Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
30.	Muhammad Yusuf, A.Md, Kom	
31.	Ferdian Saifullah, ST., M.ARS	Tim Pengumpul Data/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
32.	Hiskia Mangapul Sitorus, SE	
33.	Achmad Purwanto, S.Kom	
34.	Dewi Citrisi Ditasari, SE	Tim Pengumpul Data/Badan Kepegawaian Daerah
35.	Kiki Puspitasari, SE	Tim Pengumpul Data/Badan Penanggulangan Bencana Daerah
36.	Sumaji, S.Sos., M.Hum	Tim Pengumpul Data/Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
37.	Orlibernawati, A.Md	
38.	Adita Indra Permana, ST	
39.	Ham Ibau, S.Sos	Tim Pengumpul Data/Badan Pengelola Perbatasan Daerah
40.	Abdurrahman Akbar San, SE	
41.	Wahyu Illahim, S.Sos	
42.	Resky Hardianingsih, S.STP	Tim Pengumpul Data/Dinas Perkerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman
43.	Zulkifli, S.Sos	Tim Pengumpul Data/Badan Pendapatan Daerah
44.	Jembar, SE	Tim Pengumpul Data/Bappeda Dan Litbang
45.	Andriani, S.Kom	Tim Pengumpul Data/Dinas Kelautan Dan Perikanan
46.	Devi Ayunani, S.ST	Tim Pengumpul Data/Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
47.	Junus Ramba, S.T., M.Si	Tim Pengumpul Data/Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
48.	Enggar Arif Setiawan, S.STP	Tim Pengumpul Data/Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
49.	Ramadhansyah Sulistia. S.Si	Tim Pengumpul Data/Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
50.	Mohammad Toha, S.Hut	Tim Pengumpul Data/Dinas Kehutanan
51.	Yetty Cecelia, SE	
52.	Rosmini, ST	Tim Pengumpul Data/Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
53.	Desi Fitria Ayu, SE	
54.	Andi Panaungi, S.AP	Tim Pengumpul Data/Dinas Perhubungan
55.	Mirayati Syahrani, A.Md.LLAJ	
56.	Andhyka De Silo, S.Kom	Tim Pengumpul Data/Dinas Pemuda Dan Olahraga
57.	Drs. Priyono Pancasila, SP., FRS, APT	Tim Pengumpul Data/ RSUD

58.	Wiji Suhaji, SH	H. Jusuf SK
59.	Muhammad Hariyadi, S.Kep. Ns	
60.	Sulistiyawati Siswanto, SE	
61.	Clara Pinaria Mamahit, S.Kom	
62.	Heriyanto Sianturi, S.E.	Tim Pengumpul Data/Badan Keuangan Dan Aset Daerah
63.	Sri Wulandari, S.Sos	
64.	Gilang Baskoro Widagdo, A.Md	Tim Pengumpul Data/Dinas Sosial
65.	Saputra Sani, SE	
66.	Irawibawani, S.AP	Tim Pengumpul Data/Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
67.	Yuultje Libba Taruk Allo, ST	Tim Pengumpul Data/Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
68.	Mitfahul Fariz, S.Sos	
69.	Fadrian Menthana, S.Sos	Tim Pengumpul Data/Dinas Kesehatan
70.	Afandi Ari Setyaji, S.Kom	
71.	Eguard Hendrawan, S.Sos	Tim Pengumpul Data/Badan Penghubung
72.	Aidir, Se., M.AP	Tim Pengumpul Data/Satuan Polisi Pamong Praja
73.	Yanuar Nora Wijayanti, SE	
74.	Irfan Wihardianto, ST., CFrA	Tim Pengumpul Data/Inspektorat
75.	Riska Ayu Sylviani, SE.I	Tim Pengumpul Data/Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
76.	Egi Hariyadi, S.IP	
77.	Mochammad Wahid, ST	Tim Pengumpul Data/Dinas Pariwisata
78.	Thirda Helga Aprilla, ST	
79.	Marten Juk, S.P	Tim Pengumpul Data/Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
80.	Rosnaena, S.Si	
81.	Muhammad Sahyuti	
82.	Khafri Hidayat, S.Psi	Sekretariat/Biro Organisasi
83.	Riski, S.Sos	
84.	Yunita Yunus, SE	
85.	Lisa Hadriyani, S.Sos	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
 Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
 NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG